

Judul : Kasus Arteria Dahlan berakhir di MKD
Tanggal : Senin, 24 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Kasus Arteria Dahlan Harus Berakhir di MKD

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) seharusnya bekerja menindaklanjuti polemik pernyataan anggota DPR Arteria Dahlan. Pasalnya, pernyataannya terkait dengan bahasa Sunda mendapat protes keras dari masyarakat.

"Kalau MKD benar-benar berperan sebagai penjaga muruah, pernyataan yang menyinggung rakyat dari anggota DPR sudah harus dijadikan alasan untuk memberikan hukuman setimpal," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Sabtu (22/1).

Lucius mengaku heran dengan kader PDI Perjuangan itu yang menyampaikan pernyataan tersebut sebab dapat menyinggung perasaan masyarakat. Di sisi lain, seorang anggota dewan dipilih rakyat seharusnya membela kepentingan masyarakat ketimbang mengeluarkan pernyataan kontroversi. "Wakil rakyat, ya, mesti bersuara tentang sesuatu yang diinginkan rakyat," ungkap dia.

Menurutnya, seharusnya legitimasi seorang anggota DPR berakhir karena tin-

"Anggota dewan terdiri atas berbagai macam daerah. Mereka tentunya membawa kearifan lokal daerah masing-masing."

dak tanduknya mendapat protes dari masyarakat. Hanya, tak tersedia instrumen memungkinkan rakyat mencabut mandat anggota DPR yang kehilangan legitimasi karena pernyataan atau sikapnya.

"Kalau wakil rakyat menyampaikan suara sendiri bahkan cenderung mengejek rakyat yang diwakili, ya, harusnya sih enggak ada legitimasi lagi bagi si anggota DPR untuk memerankan dirinya sebagai wakil rakyat," ujar dia.

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus meminta anggota dewan menghormati kearifan lokal. Hal itu disampaikan agar polemik yang menyinggung bahasa

Sunda tak terulang. "Saling menghargai, setiap wilayah punya kearifan lokal, mari kita saling menghormati, saling menjaga, saling mengetahui, sehingga tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan."

Sekjen Partai Golkar itu menyampaikan anggota dewan terdiri atas berbagai macam daerah. Mereka tentunya membawa kearifan lokal daerah masing-masing. Dia mencontohkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. Eks Bupati Purwakarta itu tak jarang berpenampilan khas Sunda dalam setiap kegiatan di parlemen.

"Style orang lihat Pak Dedi, oh ini orang Jabar, atau mungkin teman-teman kita kita juga dari Papua yang membawa tas," ungkap dia.

Tak hanya penampilan, tak jarang juga anggota dewan menyampaikan bahasa daerah dalam setiap kesempatan. Hal itu dianggap sebagai simbol daerah pemilihan mereka. "Ada bahasa-bahasa, apalagi bahasa-bahasa yang menjadi ciri khas sebagai penghormatan," ujar dia. (MGN/P-1)